

**ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI KOREA SELATAN
TERKAIT PEMBATALAN PEMUTUSAN PAKTA INTELIJEN
GENERAL SECURITY OF MILITARY INFORMATION
AGREEMENT DENGAN JEPANG PADA TAHUN 2019**

Imro'atul Mufidah dan Zaky Ismail

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstrak

Korea Selatan telah mengumumkan untuk tidak melanjutkan sebuah pakta perjanjian dengan Jepang yang disebut dengan General Security of Military Information Agreement pada Agustus 2019. Namun, Korea Selatan merubah keputusannya tersebut tiga bulan kemudian pada November 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan Korea Selatan yang tidak jadi menarik diri dari pakta pada tahun 2019. Pendekatan yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis fokus penelitian eksplanatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep keamanan nasional dan teori kebijakan luar negeri oleh James N. Rosenau. Hasil dari penelitian ini adalah alasan kepentingan keamanan nasional dari ancaman nuklir Korea Utara merupakan penyebab utama Korea Selatan tidak jadi menarik diri dari pakta. Selain itu, ada beberapa faktor yang mendorong Korea Selatan untuk tetap melanjutkan pakta dengan Jepang pada November 2019, yaitu faktor individu, peran, sosial, pemerintah dan sistemik.

Kata Kunci: GSOMIA, Korea Selatan, Keamanan Nasional, Kebijakan Luar Negeri.

Pendahuluan

Semenanjung Korea merupakan salah satu kawasan yang paling bergejolak di dunia. Hal tersebut disebabkan karena kedua negara dalam semenanjung tersebut, Korea Selatan dan Korea Utara, telah mengalami ketegangan yang fluktuatif sejak awal kemerdekaan masing-masing negara. Salah satu penyebab ketegangan di antara keduanya adalah ancaman nuklir yang dikembangkan oleh Korea Utara selama ini. Menghadapi hal itu, Korea Selatan selalu bersiap siaga dalam menghadapi ancaman tersebut. Tidak hanya mengerahkan upaya domestik dengan menerapkan kebijakan wajib militer bagi setiap warga laki-laki, Korea Selatan juga bekerjasama dengan banyak negara lain. Salah satu bentuk kerjasama dalam menghadapi masalah ketegangan di Semenanjung adalah dibuatnya sebuah pakta bernama *General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA).

GSOMIA merupakan sebuah pakta kerjasama intelijen antara Korea Selatan dan Jepang, dimana mereka saling berbagi informasi mengenai program nuklir dan rudal Korea Utara. Akan tetapi, kerjasama intelijen militer antara Korea Selatan dan Jepang ini tidak berjalan mulus. Pada tahun 2019, masalah sejarah antara Korea Selatan dan Jepang pada masa penjajahan Jepang melonjak. Pada bulan Oktober-November 2018, Mahkamah Agung Korea Selatan memerintahkan Perusahaan Baja Nippon dan *Mitsubishi Heavy Industries of Japan* untuk membayar kompensasi kepada warga Korea Selatan yang dipaksa bekerja di pabriknya selama penjajahan Jepang.¹ Di tengah pertempuran hukum yang semakin meningkat ini, Jepang menghapus Korea Selatan dari daftar mitra perdagangan terpercaya pada Agustus 2019.² Menanggapi hal tersebut, Korea Selatan pun juga membalas dengan menghapus Jepang dari daftar mitra perdagangan terpercayanya dan mengadakan komplain kepada *World Trade Organization* (WTO) atas kontrol ekspor dari Jepang.³

¹ "South Korea Court May Rule on Japan firm Asset Sale in Aug. at Earliest", *Kyodo News*, 4 Juni, 2020, diakses pada 23 Desember 2020, <https://english.kyodonews.net/news/2020/06/1eae94c9f36d-s-korea-court-may-rule-on-japan-firm-asset-sale-in-aug-at-earliest.html?phrase=ruby&words=>.

² Titli Basu, "Ketegangan Perdagangan Jepang-Korea Selatan", *Air World Service*, 29 Agustus, 2019, diakses pada 17 Desember 2020, airworldservice.org/indonesian/2019/08/29/keteganga-perdagangan-jepang-korea-selatan/.

³ Rina Ayu Larasati, "Korsel Hapus Jepang dari Daftar Mitra Dagang Utama", *Kompas*, 12 Agustus, 2019, diakses pada 19 Desember 2020, <https://money.kompas.com/read/2019/08/12/210216326/korsel-hapus-jepang-dari-daftar-mitra-dagang-utama>.

Adanya perang dagang antara Korea Selatan dan Jepang memunculkan perselisihan dengan implikasi politik. Satu hari setelah menteri luar negeri Jepang dan Korea bertemu di China untuk membahas perdagangan dan keamanan nasional pada Agustus 2019, Korea Selatan mengumumkan bahwa mereka tidak akan melanjutkan pakta GSOMIA dengan Jepang lagi.⁴ Akan tetapi, tiga bulan setelah pengumuman pemutusan GSOMIA, Korea Selatan mengumumkan bahwa pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk menanggukuhkan pemutusan GSOMIA secara bersyarat dengan Jepang dan bahwa pemerintah Jepang telah menyatakan pengertiannya.⁵

Permasalahan terkait pakta GSOMIA juga telah dibahas dalam penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Azeem Nur Taqwin dalam penelitian skripsinya yang berjudul “Dinamika Politik Korea Selatan dan Pengaruhnya Terhadap Proses Kesepakatan *General Security of Military Information Agreement* Periode 2013-2016”. Dalam penelitian tersebut, penulis menggunakan pendekatan *prospect theory* yang berfokus pada pengaruh dinamika politik Korea Selatan dalam proses kesepakatan *General Security of Military Information Agreement* pada 2013-2016. Didasarkan pada gagalnya penandatanganan GSOMIA di tahun 2012, penulis meyakini bahwa adanya perubahan di sektor domestik Korea Selatan dari tahun 2013 hingga 2016 yang menyebabkan pada akhirnya kerjasama di bidang intelijen militer ini berhasil ditandatangani oleh Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2016.

Sedangkan dalam penelitian kali ini, tindakan Korea Selatan yang merubah keputusannya untuk tetap melanjutkan pakta intelijen GSOMIA dengan Jepang pun menarik perhatian penulis untuk ingin menganalisis lebih lanjut mengenai alasan dibalik perubahan keputusan Korea Selatan tersebut dengan melihat hubungan antara Korea Selatan-Jepang dan dinamika politik yang ada di Korea Selatan dari tahun 2016-2019. Penulis meyakini bahwa sebuah kebijakan luar negeri pasti dibentuk atas beberapa pertimbangan, baik dari kondisi domestik maupun kondisi eksternal, yang mana salah satu alasan di balik perubahan keputusan itu diduga karena adanya desakan kuat dari

⁴ Ibid.

⁵ Aoki Yoshiyuki, “What Comes After S. Korea Reverses Decision to End GSOMIA?”, *NHK World Japan*, 25 November, 2019, diakses pada 15 September 2020, <https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/backstories/763/#:~:text=South%20Korea%20announced%20ast%20week,known%20as%20GSOMIA%2C%20in%20place.>

Amerika Serikat.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis fokus penelitian eksplanatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka, dengan mengambil data dari sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan topik penelitian ini baik dalam bentuk cetakan maupun *online*. Selain itu, data juga diambil oleh penulis dari data primer berupa naskah perjanjian pakta GSOMIA antara Korea Selatan dan Jepang serta hasil wawancara melalui email dengan Profesor Brendan M. Howe, salah satu profesor di Universitas Ewha Womans, serta merupakan penasihat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dan Profesor Erwin Tan, seorang *associate professor* di Universitas Hankuk of Foreign Studies.

Dalam menganalisis, penulis menggunakan konsep keamanan nasional. Menurut Barry Buzan, keamanan merupakan upaya dalam mengejar kebebasan dari ancaman dan kemampuan negara dan masyarakat untuk mempertahankan identitas independen mereka dan integritas fungsional mereka melawan sebuah kekuatan yang mereka anggap sebagai ancaman.⁶ Asumsi bahwa negara tidak lagi menghadapi ancaman atau gugatan atas legitimasinya perlu mengandung sedikit tiga komponen, yaitu kedaulatan wilayah, lembaga-lembaga negara yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan terjaminnya ketertiban, keselamatan serta kesejahteraan masyarakat. Dalam artikelnya, Buzan juga mengatakan bahwa terdapat lima sektor keamanan yaitu politik, militer, ekonomi, masyarakat, dan lingkungan.⁷ Dalam hal ini, kerjasama antara Korea Selatan dan Jepang dalam bidang intelijen merupakan bentuk dari adanya bentuk gangguan dalam keamanan militer yang disebabkan oleh ancaman nuklir dari Korea Utara.

Selain konsep keamanan nasional, penulis juga menggunakan teori kebijakan luar negeri oleh Rosenau. Rosenau mengatakan bahwa terdapat lima variabel yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu individu, peran, sosial, sistemik, dan pemerintahan.⁸

⁶ Barry Buzan, "New Patterns of Global Security in The Twenty-First Century", *International Affairs Journal* Vol. 67 No. 3 (1991), <https://doi.org/10.2307/2621945>.

⁷ Barry Buzan, "New Patterns of Global Security in The Twenty-First Century"

⁸ *Ibid.*, halaman 172-173.

Pembahasan

A. Alasan-Alasan Korea Selatan Tidak Jadi Menarik Diri dari Pakta GSOMIA

1. Semenanjung Korea Secara Teknis Masih Berperang

Pada akhir Perang Dunia II, Semenanjung Korea yang baru terlepas dari penjajahan Jepang diduduki oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat dan Uni Soviet kemudian membagi semenanjung itu menjadi dua bagian, yaitu Utara dan Selatan.⁹ Hal itu disebabkan karena Amerika Serikat yang menguasai Korea bagian Selatan menginginkan agar seluruh Korea bersistemkan demokrasi, sedangkan Uni Soviet yang menguasai Korea bagian utara ingin menerapkan dasar komunisme pada bangsa Korea.¹⁰ Baik Korea Selatan dan Korea Utara menjadi dua negara berdaulat pada tahun 1948 dan kedua negara tersebut dibatasi dengan sebuah zona perbatasan yang membagi Semenanjung Korea menjadi dua.¹¹

Berada dalam satu semenanjung yang sama, awalnya kedua negara Korea ini saling mengklaim bahwa negaranya yang merupakan pusat pemerintahan. Pada Desember 1948 dalam Sidang Umum PBB, PBB menyatakan bahwa Korea Selatan adalah pemerintahan yang dianggap sebagai pemerintahan yang sah di Semenanjung dan keputusan tersebut membuat Korea Utara merasa haknya sebagai pemerintahan tidak diakui PBB dan menjadi merasa benci kepada Korea Selatan serta Amerika Serikat yang memiliki peran di balik hal tersebut.¹² Korea Utara pun pada akhirnya melancarkan Perang Korea dengan memberikan serangan mendadak pada tanggal 25 Juni 1950.¹³

Perang Korea bertahan selama tiga tahun. Pada 27 Juli 1953, para pemimpin militer dari Cina, Korea Utara, dan PBB akhirnya menandatangani gencatan senjata yang mengakhiri pertempuran. Meski perang sudah berakhir, Korea Utara dan Korea Selatan tidak pernah menandatangani perjanjian perdamaian permanen, sehingga secara teknis saat ini mereka masih berperang.

⁹ Young Ick Lew, *Brief History of Korea*.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 25.

¹¹ *Ibid.*, halaman 29.

¹² Sri Suko, *Alchtisar Sedjarah Perang Korea*, (Jakarta: Departen Pertahanan- Keamanan: 1971), dalam Leo Agung, *Sejarah Asia Timur 2* (Yogyakarta: Penerbit Ombak: 2012), halaman 132-134.

¹³ Young Ick Lew, *Brief History of Korea*, halaman 27.

Dengan melihat pada keadaan di semenanjung Korea yang masih tidak menentu, penulis melihat bahwa hal tersebut merupakan alasan Korea Selatan tetap melanjutkan pakta GSOMIA dengan Jepang pada tahun 2019.

2. Dinamika Ketegangan di Semenanjung Korea Tahun 2016-2019

Pada tahun 2016, hubungan antar dua negara Korea sangatlah dipengaruhi dengan adanya program nuklir Korea Utara. Dalam waktu setahun, Korea Utara menunjukkannya dengan jelas bahwa pengembangan program misil dan nuklir merupakan prioritas utama mereka. Hal itu ditunjukkan dengan dua uji coba nuklir yang pertama kalinya dilakukan oleh Korea Utara di tahun yang sama. Uji coba nuklir pertama Korea Utara di tahun 2016 pertama dilakukan pada awal Januari.¹⁴

Menghadapi ancaman nuklir Korea Utara yang membahayakan, Dewan Keamanan PBB pada 2 Maret 2016 mengeluarkan Resolusi 2270 Dewan Keamanan PBB, yang mana resolusi tersebut mewajibkan bagi semua negara untuk memeriksa setiap kargo yang datang dari atau pergi ke Korea Utara dan larangan perdagangan dengan Korea Utara dalam sumber daya alam.¹⁵ Namun delapan bulan kemudian, Korea Utara melakukan uji coba nuklir lagi pada 9 September 2016.

Kebanggaan Korea Utara atas uji coba nuklir tersebut seakan menantang sanksi internasional dan tekanan diplomatik yang sudah berlangsung lama untuk mengekang ambisi nuklirnya. Hal itu pun menimbulkan kekhawatiran bagi negara lain. Kekhawatiran tersebut lah yang pada akhirnya membuat Korea Selatan di bawah pemerintahan Presiden Park Geun Hye menandatangani pakta GSOMIA dengan Jepang pada 23 November 2016.

Pada tahun berikutnya di tahun 2017, tindakan Korea Utara masih tidak berbeda dengan tahun sebelumnya dan dapat dikatakan lebih berani. Dalam pidato tahun baru tahunannya pada 1 Januari, Kim Jong-un memuji kemajuan senjata nuklir negaranya dan mengatakan negara itu berada dalam tahap akhir persiapan

¹⁴ Marco Milani, "Korean Peninsula 2016: The Never-Ending Crisis", *The Journal of the Italian Think Tank on Asia*, (2018): 91, diakses pada 4 Desember 2020, <https://www.asiamaior.org/files/04%20Asia%20Maior%202016%20Korean%20Peninsula.pdf>.

¹⁵ Marco Milani, "Korean Peninsula 2016: The Never-Ending Crisis".

untuk menguji rudal balistik antarbenua.¹⁶ Dalam setahun itu, Korea Utara berhasil meluncurkan sejumlah 16 rudal balistik¹⁷. Selain keenam belas uji peluncuran rudal tersebut, Korea Utara juga melakukan uji coba nuklir keenamnya dalam sejarah pada 3 September yang menyebabkan gempa bumi berkekuatan 6,3 skala Richter dan lebih kuat daripada bom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki selama perang dunia kedua.¹⁸

Jika pada tahun 2017 Semenanjung Korea penuh dengan konflik, tahun 2018 sangatlah berbeda. Kedua negara Korea mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dan membahas mulai dari masalah denuklirisasi di Semenanjung Korea, pengakhiran perang dan pembentukan perdamaian di Semenanjung Korea, pembukaan saluran komunikasi permanen antara Selatan dan Utara, reuni keluarga yang terpecah, hingga rencana pengembangan hubungan antar-Korea.¹⁹ Di tahun 2018, KTT *inter-Korea* dilaksanakan hingga tiga kali. Ketiga KTT tersebut meningkatkan ekspektasi bagi tiap pihak yang bersangkutan dan juga menantikan sesuatu yang lebih akan terjadi pada tahun berikutnya.

Namun nyatanya, tahun 2019 tidaklah demikian. Selama bulan-bulan pertama tahun 2019, hubungan antar-Korea tampak berjalan di jalur positif. Pada 17-18 Januari 2019, Kim Yong Chol, utusan dari Korea Utara melakukan perjalanan ke Washington untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan Presiden Trump.²⁰ Pada hari kedua kunjungan tersebut, Gedung Putih mengumumkan bahwa kedua negara akan melaksanakan KTT yang kedua pada akhir Februari. Dalam pidato kenegaraannya tanggal 5 Februari, Trump

¹⁶ Mark E. Manyin, *North Korea: A Chronology of Events from 2016 to 2020*, (USA: Library of Congress, 2020), diakses pada 11 Desember 2020, https://www.everycrsreport.com/files/20200505_R46349_6307d94932ea867fd6c287e740681164c6f83bd3.pdf.

¹⁷ “North Korea Missile Activity in 2017”, *Center for Arms Control and Non-Proliferation*, 30 November, 2017, diakses pada 8 Desember 2020, <https://armscontrolcenter.org/fact-sheet-north-korea-missile-activity-2017/>.

¹⁸ “North Korea Nuclear Crisis: Putin Warns of Planetary Catastrophe”, *The Guardian*, 5 September, 2017, diakses pada 8 Desember 2020, <https://www.theguardian.com/world/2017/sep/05/south-korea-minister-redeploying-us-nuclear-weapons-tensions-with-north>.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 55.

²⁰ Mark Landler dan David E. Sanger, “Trump and Kim Jong-un to Hold Second Summit Meeting Next Month”, *The New York Times*, 18 Januari, 2019, diakses pada 13 Desember 2020, <https://www.nytimes.com/2019/01/18/us/politics/trump-kim-summit.html>.

mengumumkan bahwa KTT tersebut akan berlangsung di Vietnam pada 27 -28 Februari.²¹

Namun nyatanya, KTT Korea Utara dan Amerika Serikat di Hanoi tersebut mengalami kebuntuan. Korea Utara ingin agar Amerika Serikat mengangkat sanksi ekonomi terhadap Korea Utara, namun Amerika Serikat sendiri tak mau melakukannya apabila Korea Utara tidak melakukan denuklirisasi secara total.²² Bagaimanapun, kapabilitas nuklir memang bukan hal yang bisa Kim Jong Un serahkan begitu saja dengan mudah. Kebuntuan KTT Korea Utara-Amerika Serikat di Hanoi tersebut memberikan dampak pada Korea Selatan.

Dengan melihat pada dinamika ketegangan yang tidak fluktuatif di antara Korea Selatan dan Korea Utara sejak pakta GSOMIA ditandatangani pada tahun 2016, serta dengan melihat pada sikap Korea Utara yang tidak dapat ditebak dan masih menjadi ancaman bagi Korea Selatan, penulis memandang bahwa hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Korea Selatan untuk tetap melanjutkan pakta GSOMIA dengan Jepang pada bulan November 2019.

3. Nuklir Korea Utara Merupakan Ancaman Bersama bagi Korea Selatan dan Jepang

Selama ini, hubungan antara Korea Selatan dan Jepang terlihat seperti hubungan yang ‘dekat tapi jauh’. Setelah pembebasan Korea Selatan dari Jepang pada tahun 1945, kedua negara hidup dalam isolasi satu sama lain. Namun untuk pertama kalinya, kedua negara menandatangani perjanjian yang disebut dengan *Treaty on Basic Relations* pada 22 Juni 1965 di Tokyo.²³ Meskipun perjanjian sudah ditandatangani dan kerjasama sudah mulai dibangun, hubungan Korea Selatan-Jepang tetaplah rapuh.

Namun, ancaman nuklir dari Korea Utara menghadirkan peluang bagi hubungan Korea Selatan dan Jepang. Pada 23 November 2016, Korea Selatan dan Jepang menandatangani pakta GSOMIA. Dikutip dari portal berita resmi

²¹ “State of the Union: Trump Announces Second North Korea Summit”, *BBC News*, 6 Februari, 2019, diakses pada 13 Desember 2020, <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47139969>.

²² Tong Hyung Kim, "South Korean President Moon Calls for 4th Summit With Kim Jong Un", *The Diplomat*, 16 April, 2019, diakses pada 2 Juni 2021, <https://thediplomat.com/2019/04/south-korean-president-moon-calls-for-4th-summit-with-kim-jong-un/>.

²³ Ibid.

Korea.net, dalam wawancaranya dengan Lee Young-chaе, seorang profesor dari Universitas Keisen Tokyo, Lee Young Chae mengatakan bahwa “Penembakkan rudal balistik jarak menengah Taepodong-1 oleh Korea Utara pada tahun 1998 membuat Jepang berada dalam jangkauan rudal Korea Utara. Hal tersebut merubah pandangan Jepang terhadap Korea Utara. Jadi, berbagi informasi intelijen dengan Korea Selatan melalui GSOMIA adalah penting untuk menjaga keamanan nasional Jepang”.²⁴

Selain itu, berdasarkan pada pernyataan dari Brendan M. Howe, seorang Profesor Studi Korea dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis melalui email, dia menyatakan bahwa:

*“Originally signed in 2016, GSOMIA is a bilateral agreement which facilitates intelligence sharing between the two countries and is symbolic of the hope that Seoul and Tokyo can work together to promote shared interests. The agreement provides a direct line for South Korea and Japan to share intelligence on North Korea and other security issues in the region. The pact also helps South Korea and Japan cover gaps in their own intelligence gathering on North Korea, with Japan providing South Korea data on long-range missile tests, while Seoul has human intelligence resources in the North that Tokyo cannot replicate.”*²⁵

Pada intinya, pakta GSOMIA ini sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak karena dapat membantu Korea Selatan dan Jepang melengkapi kekurangan dalam pengumpulan intelijen masing-masing mengenai Korea Utara, dengan Jepang yang menyediakan data tentang uji coba rudal jarak jauh, dan Korea Selatan yang memiliki sumber daya intelijen manusia di Korea Utara yang tidak dapat ditiru oleh Jepang.

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa keamanan nasional dan ancaman bersama antara Korea Selatan dan Jepang itulah yang membuat dua negara yang sebenarnya saling membenci ini mau tak mau harus meneruskan kerjasama dan mempertahankan aliansi demi melindungi keamanan dan pertahanan negara masing-masing.

²⁴ Lee Young Chae, wawancara oleh Korea.net, 31 Oktober 2019.

²⁵ Brendan M. Howe, pesan *e-mail* kepada penulis, 9 Februari 2021.

4. Hubungan Kuat antara Korea Selatan dan Amerika Serikat

Keberhasilan Korea Selatan menjadi negara maju seperti saat ini tidak terlepas dari bantuan Amerika Serikat. Ketika pasukan Amerika menduduki Korea Selatan pada tahun 1945, situasi ekonomi Korea Selatan sangatlah suram sebagai akibat dari kebijakan kekaisaran Jepang selama akhir Perang Dunia II dan pembagian semenanjung yang tiba-tiba.²⁶ Perang Korea yang terjadi pada tahun 1950-1953 malah makin memperburuk kondisi ekonomi mereka. Amerika Serikat yang memihak pada Korea Selatan pun memberikan program bantuan ekonomi besar-besaran ke Korea Selatan.

Bantuan ekonomi Amerika tersebut sangatlah berperan penting dalam membantu Korea Selatan untuk bertahan di masa-masa yang sangat sulit dalam sejarahnya. Situasi ekonomi di Korea Selatan mulai berubah selama tahun 1960-an setelah Park Chung Hee merebut kekuasaan dalam kudeta militer dan menjadikan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama Korea Selatan²⁷. Selama tahun 1970-an, Korea Selatan menjadi makin lebih mandiri. Korea Selatan meluncurkan inisiatif baru yang mendorong perusahaan Korea untuk pindah ke industri berat dan inisiatif tersebut sangatlah membuahkan hasil yang sangat bagus dan perusahaan-perusahaan tersebut sangatlah berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan.²⁸ Beberapa perusahaan tersebut banyak yang masih eksis hingga sekarang, seperti Hyundai, LG, Samsung, SK Group, dan masih banyak lagi.

Tidak hanya beraliansi di bidang ekonomi, kedua negara ini tentunya juga beraliansi di bidang keamanan militer. Aliansi militer Amerika Serikat-Korea Selatan sudah muncul sejak masa Perang Korea. Selama perang, pasukan Korea Selatan ditempatkan di bawah kendali operasional Komando PBB yang dipimpin Amerika. Di akhir perang, Amerika Serikat dan Korea Selatan menandatangani sebuah perjanjian bernama *Mutual Defense Treaty* yang mana menurut ketentuan

²⁶ Gregg Brazinsky, "US-South Korea Relations", *Wilson Center Digital Archive*, diakses pada 15 Desember 2020, <https://digitalarchive.wilsoncenter.org/resource/modern-korean-history-portal/us-south-korea-relations-1945>.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

perjanjian itu, Amerika Serikat berkomitmen untuk membela Korea Selatan dari segala serangan.²⁹

Mutual Defense Treaty tersebut memiliki beberapa implikasi penting. Berdasarkan perjanjian itu juga, Amerika Serikat memperoleh hak untuk mendirikan pangkalan militer di Korea Selatan dan menempatkan pasukannya di sana.³⁰ Pada saat itu, Amerika Serikat menempatkan 720.000 tentara di sana untuk membantu pertahanan Korea Selatan.³¹ Amerika Serikat juga memikul tanggung jawab untuk melatih dan mendukung pasukan Korea Selatan. Selama tahun 1950-an, Amerika Serikat memberi pemerintah Syngman Rhee bantuan militer hingga ratusan juta dolar, memasok sebanyak 87 persen dari keseluruhan anggaran pertahanan negara.³²

Pengaruh Amerika sangatlah luas dan hampir hadir di setiap aspek kehidupan Korea Selatan. Selama bertahun-tahun, aliansi militer, kemitraan ekonomi, dan hubungan politik yang erat telah menjadikan Amerika Serikat sebagai faktor yang tak terhindarkan dalam menentukan arah peristiwa di Korea Selatan. Tak lain juga dalam peristiwa saat Korea Selatan memutuskan untuk tidak akan melanjutkan pakta GSOMIA dengan Jepang, yang mana keputusan itu sangatlah mengecewakan Amerika Serikat dan membuat Amerika Serikat terus menekan Korea Selatan agar segera berdamai dengan Jepang. Di sisi lain, Korea Selatan juga masih tetap membutuhkan pasukan Amerika Serikat untuk membantu berjaga di zona demiliterisasi. Oleh karena itu, penulis memandang bahwa hubungan Korea Selatan yang terikat erat dengan Amerika Serikat itulah yang membuat Korea Selatan tetap melanjutkan pakta GSOMIA dengan Jepang.

B. Konfirmasi Teoritik Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan dengan Konsep Keamanan Nasional

Barry Buzan mengatakan bahwa keamanan nasional berkaitan dengan kemampuan negara untuk mempertahankan identitas independen mereka untuk melawan sebuah kekuatan yang mereka anggap sebagai ancaman dan negara

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

³² Ibid.

diasumsikan menghadapi ancaman ketika salah satu dari ketiga komponennya terganggu, yaitu kedaulatan wilayah, lembaga-lembaga negara yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan terjaminnya ketertiban, keselamatan serta kesejahteraan masyarakat.³³ Barry Buzan juga mengatakan bahwa terdapat lima sektor keamanan yaitu politik, militer, ekonomi, masyarakat, dan lingkungan.³⁴

Selama ini, salah satu tantangan terbesar yang perlu dihadapi oleh pemerintah Korea Selatan adalah kesejahteraan dan keselamatan masyarakatnya dari ancaman militer nuklir Korea Utara. Dalam hal ini, Korea Selatan melihat bahwa menjaga keamanan negara serta melindungi rakyatnya dari ancaman nuklir adalah suatu hal yang prioritas, sehingga melanjutkan pakta GSOMIA dengan Jepang perlu dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keamanan nasional. Selain itu, penulis juga melihat bahwa melanjutkan pakta GSOMIA dengan Jepang adalah bentuk upaya Korea Selatan dalam memegang kuat cita-cita negaranya sebagai negara yang berdaulat yang dapat melindungi komponen-komponen penting bagi sebuah unit negara, salah satunya rakyat.

Keamanan nasional memang erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Dalam melindungi masyarakat dari ketakutan dan kecemasan, negara perlu memanfaatkan *power* dan *resources* yang dimilikinya. Tiap negara membutuhkan tentara yang kuat dan aktif disertai dengan intelijen yang efektif, sistem hukum yang baik, keamanan siber, dan kebijakan imigrasi untuk melindungi tanah air dan mengamankan perbatasan negara. Dalam hal ini, Korea Selatan adalah negara kaya dengan kapabilitas militernya yang tergolong kuat. Pada tahun 2019, Korea Selatan berkedudukan di peringkat 7 dari 138 negara dalam hal kekuatan militernya.³⁵

Di bawah pemerintahan Moon Jae-in, Korea Selatan telah berupaya untuk mengoptimalkan kekuatan pertahanan Korea Selatan. Sejak tahun 2018, Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan mencanangkan rencana yang disebut dengan *Defence Reform 2.0*, yang mana hal itu bertujuan untuk menciptakan fondasi bagi

³³ Barry Buzan, *People, State, and Fear: The National Security Problem in International Relations*.

³⁴ Barry Buzan, "New Patterns of Global Security in The Twenty-First Century".

³⁵ "GFP Power Ranking Index of Nations Since 2005", *Global Fire Power*, diakses pada 16 Desember 2020, <https://www.globalfirepower.com/global-ranks-previous.asp>.

peningkatan militer Korea Selatan.³⁶ Reformasi pertahanan Korea Selatan tersebut perlu diiringi dengan adopsi teknologi mutakhir untuk mengatur sistem pertahanan dengan lebih baik.³⁷ Untuk reformasi yang ambisius tersebut, Korea Selatan perlu meningkatkan anggaran pertahanannya secara signifikan. Menurut Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan, rencana *Defence Reform 2.0* itu adalah rencana jangka menengah yang dimulai pada tahun 2019-2023 dan memerlukan alokasi dana sebesar \$242 miliar.³⁸ Namun, anggaran pertahanan sebesar \$242 miliar tersebut tidaklah mudah, terutama dengan biaya jaminan sosial yang meningkat pesat dan pertumbuhan ekonomi yang lamban di bawah pemerintahan Moon Jae-in sekarang ini.

Maka selagi pemerintah Korea Selatan memikirkan cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negaranya, memutuskan pakta GSOMIA dengan Jepang akan menjadi kesulitan tambahan bagi Korea Selatan. Bagaimanapun, pakta GSOMIA ini sangat berguna dalam mempertahankan keamanan nasional Korea Selatan dari ancaman nuklir Korea Utara. Sebab melalui pakta tersebut, Korea Selatan dapat menerima informasi penting dari Jepang mengenai kegiatan nuklir Korea Utara.

C. Konfirmasi Teoritik Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan dengan Teori Kebijakan Luar Negeri

Rosenau mengatakan bahwa terdapat lima variabel yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu: 1) individu: karakteristik dari para pembuat kebijakan luar negeri, 2) peran: peranan yang ditempati oleh pengambil keputusan kebijakan luar negeri berdasarkan jabatannya, tanpa memperhatikan karakteristik individunya, 3) sosial: aspek-aspek nonpemerintah dari suatu masyarakat yang mempengaruhi kebijakan luar negeri, 4) sistemik: aspek nonmanusiawi yang dapat mempengaruhi pilihan dalam membuat kebijakan luar negeri, dan 5) pemerintah: aspek-aspek struktur pemerintah.³⁹

Dalam penelitian ini, individu yang akan dianalisis perilakunya adalah

³⁶ Seong Ho Sheen, "South Korea's Overdue Defence Reforms", *East Asia Forum*, 29 Mei, 2019, diakses pada 16 Desember 2020, <https://www.eastasiaforum.org/2019/05/29/south-koreas-overdue-defence-reforms/>.

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid., halaman 172-173.

Presiden Moon Jae-in karena keputusan Korea Selatan yang tidak jadi menarik diri dari pakta GSOMIA dengan Jepang pada tahun 2019 terjadi di bawah pemerintahan Presiden Moon Jae-in. Tiga hari sebelum Korea Selatan memutuskan untuk tidak jadi menarik diri dari pakta GSOMIA, Moon Jae-in mengatakan bahwa “pemerintah akan mencoba sampai akhir untuk menghindari penghentian kesepakatan dengan Jepang tentang pertukaran informasi militer, tetapi itu tergantung pada sikap Jepang terkait pembatasan ekspornya terhadap Korea”.⁴⁰ Kemudian pada 22 November 2020 pukul 6 p.m, melalui staff pemerintahan Moon Jae-in, Korea Selatan mengumumkan bahwa mereka memutuskan untuk tidak jadi mengakhiri GSOMIA secara bersyarat dengan Jepang dan bahwa pemerintah Jepang telah menyatakan pengertiannya.⁴¹

Penulis memandang bahwa keputusan Moon Jae-in untuk meneruskan pakta GSOMIA dengan Jepang adalah sikap yang logis dan rasional dalam memutuskan suatu kebijakan. Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan dari Erwin Tan, seorang profesor Studi Korea. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, ia menyatakan bahwa:

“He (Moon Jae-in) initially took a tough line against Japan as a form of brinkmanship in trying to coerce Japan into addressing the ROK's anger over the issue of Japanese colonial exploitation of Korea; when the Japanese made their defiance clear, Moon decided not to carry through with this threat because of the recognition that, strains in ROK-Japan relations, North Korea was the real enemy.”⁴²

Keputusan yang dilakukan oleh Moon Jae-in menunjukkan pengakuannya bahwa terlepas dari ketegangan di antara Korea Selatan dan Jepang, musuh sebenarnya adalah tetap Korea Utara. Keputusan Moon Jae-in yang tetap melanjutkan pakta GSOMIA dengan Jepang adalah termasuk bentuk kepeduliannya juga terhadap rakyat Korea Selatan. Moon Jae-in melihat bahwa menjaga keamanan negara serta melindungi warganya dari ancaman nuklir Korea Utara adalah suatu hal yang prioritas.

Selain melihat pada karakteristik Moon Jae-in, penulis juga melihat pada

⁴⁰ "President Moon Hosts Town Hall Meeting Televised Live", *The Republic of Korea Cheong Wa Dae*, 20 November, 2019, diakses pada 25 Desember 2020, <https://english1.president.go.kr/Media/News/652>.

⁴¹ Kim You Geun, “Korea conditionally suspends termination of military pact with Japan”

⁴² Erwin Tan, pesan *e-mail* kepada penulis, 10 Februari 2021.

partai politik yang menaungi Moon Jae-in, *Democratic Party*, yang merupakan bagian dari kubu progresif. Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yang konservatif, yang ‘Pro-Amerika’ dan ‘Anti-Korea Utara’, kubu progresif menganggap Korea Utara adalah negara kerabat yang akan diajak berdamai dan cenderung melihat Amerika Serikat sebagai perusak potensial dari rekonsiliasi antar-Korea.⁴³ Namun meski begitu, progresif masih menghargai bagaimana aliansi antara Korea Selatan dan Amerika Serikat.

Berdasarkan karakteristik dari progresif tersebut, penulis membenarkan bahwa variabel individu memiliki peran yang signifikan dalam pembuatan kebijakan luar negeri dan bahkan dapat menjadi kekuatan utama di panggung global. Hal itu dibuktikan dengan bagaimana Moon Jae-in yang melakukan usaha yang besar dalam mengajak Korea Utara untuk berdialog. Pada saat dirinya mendapat tekanan dari Amerika Serikat untuk tetap melanjutkan pakta GSOMIA pun, Moon Jae-in tidak langsung mendengarkan. Namun dikarenakan adanya banyak pertimbangan, mulai dari kepentingan keamanan nasional dan demi melindungi rakyatnya dari ancaman yang tidak pasti dari Korea Utara, Moon Jae-in pun akhirnya mengubah keputusannya dan meminta staff kepresidenannya untuk mengumumkan bahwa Korea Selatan akan tetap melanjutkan pakta GSOMIA dengan Jepang.

Variabel kedua adalah peran. Variabel peran ini berkaitan dengan peranan yang ditempati oleh para pengambil keputusan kebijakan luar negeri berdasarkan jabatannya, tanpa memperhatikan karakteristik individunya.⁴⁴ Dalam kasus yang terjadi di Korea Selatan ini, peranan tersebut ditempati oleh Jeong Kyeong Doo, Menteri Pertahanan Korea Selatan tahun 2019 dan Kang Kyung Hwa, Menteri Luar Negeri Korea Selatan sebab keduanya telah beberapa kali hadir dalam pertemuan internasional untuk melakukan negosiasi terkait pakta GSOMIA.

Pada 4 November 2019, Menteri Pertahanan Nasional Korea Selatan Jeong Kyeong Doo mengutarakan pendapatnya di pertemuan komite pertahanan bahwa Korea Selatan harus mempertahankan pakta GSOMIA dengan Jepang demi

⁴³ Haesook Chae dan Steven Kim, *Conservatives and Progressives in South Korea*, (Washington: The Washington Quarterly, 2008), diakses pada 21 Desember 2020, https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/twq08autumnchaekim.pdf.

⁴⁴ Rosenau, “The Study of World Politics”, halaman 172-173.

kepentingan keamanan nasional.⁴⁵ Dia mengatakan berulang kali pada parlemen betapa pentingnya kerjasama bilateral itu dengan Jepang, namun juga menambahkan bahwa masalah pembatasan ekspor Jepang juga harus diselesaikan.⁴⁶

Pada 8 November, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung Hwa juga mengatakan pada anggota parlemennya bahwa kemungkinan penghentian pakta intelijen militer GSOMIA antara Korea Selatan dan Jepang dapat menguntungkan Korea Utara dan China.⁴⁷ Kang Kyung Hwa memahami bahwa keputusan awal untuk memutuskan pakta adalah keputusan yang tak terhindarkan karena sengketa perdagangan dan sejarah yang terjadi, namun dia juga menambahkan bahwa konsekuensi tambahan dari pemutusan pakta adalah dapat membebani penanganan hubungan diplomatik lainnya⁴⁸, yang mana maksudnya adalah hubungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat akan mendapat masalah. Kang Kyung Hwa juga menegaskan kembali bahwa Korea Selatan dapat mempertimbangkan kembali keputusannya tentang pemutusan pakta hanya apabila Jepang membatalkan pembatasan ekspornya terhadap Korea Selatan.⁴⁹

Bentuk ucapan yang dilontarkan kedua menteri tersebut menunjukkan bahwa variabel peran yang ditempati oleh Menteri Kang Kyung Hwa dan Menteri Jeong Kyeong Doo ini memiliki peranan dalam mengambil suatu kebijakan luar negeri berdasarkan jabatannya masing-masing. Dan salah satu bukti yang membenarkan peranan tersebut adalah tawaran dari Jepang yang akan mempertimbangkan kembali kontrol ekspornya,⁵⁰ dengan mengajak Korea Selatan untuk melakukan dialog kebijakan tingkat tinggi untuk mengulas masalah pembatasan ekspor dari Jepang tersebut,⁵¹ yang mana keputusan Jepang tersebut tentunya diambil setelah berulang

⁴⁵ "Defense Minister: GSOMIA Should Be Kept If It Helps Security", *KBS World Radio*, 4 November, 2019, diakses pada 19 Desember 2020, http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=e&Seq_Code=149109.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Yonhap, "FM Sees Point in Claims GSOMIA Termination Could Benefit NK, China", *The Korea Herald*, 8 November, 2019, diakses pada 19 Desember 2020, www.koreaherald.com/view.php?ud=20191108000616.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Yoo Kang Moon, "S. Korea Succumbs to US Pressure to Extend GSOMIA", *Hankyoreh*, 25 November, 2019, diakses pada 20 Desember 2020, english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/918428.html.

⁵¹ Aoki Yoshiyuki, "What Comes After S. Korea Reverses Decision to End GSOMIA?".

kali melakukan pertemuan serta negosiasi dengan Korea Selatan.

Variabel ketiga adalah sosial. Variabel ini terdiri dari aspek-aspek nonpemerintah dari suatu masyarakat yang mempengaruhi kebijakan luar negeri. Dalam *polling* yang dilakukan oleh media Korea YTN *News* pada 23 Agustus 2019 dan diikuti oleh 10.685 masyarakat Korea Selatan dari seluruh negeri, 54,9% responden mengatakan bahwa keputusan itu adalah keputusan yang baik, 38,4% mengatakan itu keputusan yang buruk, dan sisanya 6,7% memilih tidak merespon.⁵² Polling tersebut memang terlihat kontradiktif dengan keputusan pemerintah Korea Selatan yang tidak jadi menarik diri dari pakta GSOMIA dengan Jepang. Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan sendiri juga mengakui bahwa kerjasama intelijen dengan Jepang tidak mendapat banyak dukungan dari masyarakat. Namun mereka memiliki perspektif sendiri dan mengatakan bahwa “bagi Kementerian Pertahanan Nasional, keamanan nasional dan perlindungan kehidupan rakyat adalah prioritas utama dalam menanggapi ancaman musuh yang semakin meningkat”.⁵³

Hal tersebut mengkonfirmasi pernyataan Rosenau dalam bukunya bahwa opini masyarakat dapat menentukan suatu kebijakan luar negeri dan jika opini masyarakat terbelah menjadi dua atau lebih, potensi variabel sosial ini akan makin memiliki peran penting karena hal tersebut membuat pejabat kebijakan luar negeri semakin sulit untuk memobilisasi dukungan yang memadai untuk kebijakan mereka. Bagaimanapun dalam hal ini, pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk melanjutkan pakta GSOMIA sebab rasa takut dan rasa tegang yang dialami masyarakat Korea Selatan selama berpuluh-puluh tahun setidaknya dapat diatasi melalui upaya berbagi informasi intelijen militer dengan Jepang terkait dengan aktivitas nuklir dan rudal Korea Utara.

Variabel keempat adalah sistemik. Variabel ini mencakup aspek nonmanusiawi yang dapat mempengaruhi pilihan dalam membuat kebijakan luar negeri, seperti aliansi, geografi, ideologi, ekonomi, dan lainnya. Dalam penelitian ini,

⁵² “The End of GSOMIA: 55% Good Decision VS 38% Bad Decision”, *Realmeter*, 26 Agustus 2019, diakses pada 19 Desember 2020, www.realmeter.net/한일-지소피아-종료-잘한-결정-55-vs-잘못한-결정-38/?ckattempt=1.

⁵³ Yang Sae Rom, “From Re-implementation of the Controversial Korea-Japan Military Information Agreement to the Final Signing”, *News J*, 23 November, 2011, diakses pada 19 Desember 2020, <https://n.news.naver.com/article/421/0002409353>.

penulis memandang bahwa aspek yang mempengaruhi keputusan Korea Selatan untuk tidak jadi menarik diri dari pakta GSOMIA adalah faktor aliansinya dengan Amerika Serikat. Hal tersebut disebabkan saat Korea Selatan mengumumkan untuk tidak akan melanjutkan pakta GSOMIA dengan Jepang pada Agustus 2019, Amerika Serikat terus melakukan penekanan kepada Korea Selatan dalam berbagai kesempatan.

Sehari setelah Korea Selatan mengumumkan akan memutuskan pakta GSOMIA dengan Jepang, Menlu Amerika Serikat Mike Pompeo menyatakan pada wartawan dalam sebuah konferensi pers di Kanada bahwa Amerika Serikat merasa kecewa dengan keputusan yang dibuat Korea Selatan itu.⁵⁴ Tidak hanya itu, tekanan dari Amerika Serikat juga ditunjukkan melalui pertemuan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper dengan Menteri Pertahanan Korea Selatan Jeong Kyeong Doo dalam *51st Security Consultative Meeting* di Seoul pada 15 November 2019. Mark Esper secara terbuka mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya akan terus mendorong Korea Selatan untuk merubah keputusannya agar tetap melanjutkan pakta GSOMIA dengan Jepang.⁵⁵

Tak hanya dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo juga melakukan penekanan dengan melakukan panggilan telepon dengan Menlu Korea Selatan Kang Kyung Hwa tepat satu hari sebelum pakta GSOMIA dapat dikatakan resmi berakhir dan mengatakan bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat perlu bekerjasama dalam menyukseskan strategi Indo-Pasifik Amerika Serikat.⁵⁶ Sebab, Amerika Serikat memandang bahwa pakta GSOMIA tersebut tidak hanya terkait pertukaran informasi mengenai program rudal dan nuklir Korea Utara, namun juga kemampuan militer China yang berkembang secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir.⁵⁷

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa tekanan-tekanan dari

⁵⁴ Yonhap, "US Expresses 'Strong Concern,' 'Disappointment' at Termination of Seoul-Tokyo Intel Pact", *Korea Herald*, 23 Agustus, 2019, diakses pada 20 Desember 2020, www.koreaherald.com/view.php?ud=20190823000106.

⁵⁵ Jung Damin, "Criticism Grows over US Pressing Seoul on GSOMIA".

⁵⁶ Motoko Rich dan Edward Wong, "Under U.S. Pressure, South Korea Stays in Intelligence Pact With Japan".

⁵⁷ Abraham M. Denmark, "The U.S.-ROK Alliance and Policy Coordination Toward China", *Council on Foreign Relations*, 19 Maret, 2019, diakses pada 20 Desember 2020, <https://www.cfr.org/blog/us-rok-alliance-and-policy-coordination-toward-china>.

Amerika Serikat tersebut merupakan salah satu bentuk faktor yang menyebabkan Korea Selatan tidak jadi menarik diri dari pakta GSOMIA dengan Jepang pada November 2019 lalu. Penulis memandang Korea Selatan menyadari bahwa mengakhiri GSOMIA dengan Jepang tidaklah memberikan keuntungan diplomatik bagi mereka, karena hal itu dapat memberikan sebuah kesempatan bagi aliansi Korea Utara-China untuk menyebarkan perselisihan antara Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang yang sudah membangun aliansi sejak lama. Di sisi lain, Korea Selatan juga masih memerlukan bantuan tentara Amerika Serikat untuk membantu menjaga zona demiliterisasi.

Variabel kelima adalah pemerintah. Variabel ini mengacu pada aspek-aspek struktur pemerintah, seperti hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif, apakah saling membatasi atau mendorong dalam pemutusan kebijakan luar negeri. Di Korea Selatan, lembaga legislatif terdiri dari Majelis Umum yang terdiri dari 300 anggota tetap dan untuk lembaga eksekutif yang dipimpin langsung oleh presiden dan terdiri dari menteri beserta kabinet-kabinetnya. Majelis Umum adalah lembaga yang mewakili pendapat rakyat Korea Selatan dan memiliki wewenang untuk membuat undang-undang.⁵⁸ Sedangkan presiden Korea Selatan memiliki wewenang untuk mengusulkan undang-undang ke Majelis Nasional.⁵⁹

Mayoritas anggota dari lembaga-lembaga ini memiliki partai, yang mana partai di Korea Selatan sendiri terbagi menjadi dua kubu, Progresif dan Konservatif. Maka apabila seorang presiden dari suatu partai politik terpilih, maka mayoritas kursi Majelis Nasional yang ada sebaiknya ditempati oleh anggota yang bernaung di bawah partai politik yang sama dengan presiden atau setidaknya memiliki pemahaman yang sama dengan presiden. Karena jika terdapat kasus dimana presiden ingin mengusulkan sebuah undang-undang, maka mayoritas anggota Majelis Nasional, dengan partai politik yang sama atau dengan pemahaman yang sama, akan dapat dengan mudah mengesahkan undang-undang tersebut.

Pada saat permasalahan GSOMIA terjadi, mayoritas anggota lembaga pemerintahan yang sedang menjabat adalah partai politik yang berkubukan progresif.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

Presiden Moon Jae-in sendiri berpartaikan *Democratic* yang tergolong dalam kubu progresif. Mayoritas Majelis Nasional Korea Selatan yang sedang menjabat pun adalah blok partai politik yang progresif.

No	Partai	Jumlah Kursi
1.	<i>Democratic Party (Progressive)</i>	123
2.	<i>Saenuri Party (Conservative)</i>	122
3.	<i>People's Party (Progressive)</i>	38
4.	<i>Justice Party (Progressive)</i>	6
5.	Independen	11

Tabel 4.1. Majelis Nasional Korea Selatan 2016-2020

Sumber: *Asia Maior*⁶⁰

Tabel diatas menunjukkan bahwa anggota Majelis Nasional yang mayoritas anggotanya merupakan bagian dari kubu progresif, maka dapat disimpulkan hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif saat memutuskan mengenai dilanjut atau tidaknya pakta GSOMIA adalah selaras. Berbeda dengan karakteristik konservatif yang ‘Pro-Amerika’ dan ‘Anti-Korea Utara’, karakteristik dari progresif adalah melihat Korea Utara sebagai negara kerabat yang ingin diajak berdamai, memandang Amerika Serikat sebagai perusak potensial dari rekonsiliasi antar-Korea, namun tidak melupakan ancaman nuklir Korea Utara dan tetap menghargai bagaimana hubungan aliansi antara Amerika Serikat-Korea Selatan.⁶¹

Karakteristik tersebut persis menggambarkan bagaimana Moon Jae-in sebagai pemimpin eksekutif di Korea Selatan yang mengusahakan dialog dengan Korea Utara pada tahun 2018. Pada saat dirinya mendapat tekanan dari Amerika Serikat untuk tetap melanjutkan pakta GSOMIA pun, Moon Jae-in tidak langsung mendengarkan. Karena baginya, melanjutkan kerjasama dalam bidang keamanan dengan negara Jepang yang menghambat kegiatan ekspor Korea Selatan dengan beralasan atas masalah keamanan adalah hal yang tidak logis. Namun dikarenakan adanya banyak pertimbangan, mulai dari komentar Menlu dan Menteri Pertahanannya, kepentingan untuk melindungi rakyatnya dari ancaman nuklir Korea Utara, dan tekanan dari

⁶⁰ Marco Milani, “Korean Peninsula 2016: The Never-Ending Crisis”, halaman 95.

⁶¹ Haesook Chae and Steven Kim, “Conservatives and Progressives in South Korea”.

aliansinya, Moon Jae-in pun akhirnya mengutus staff kepresidenannya untuk mengumumkan bahwa Korea Selatan akan tetap melanjutkan pakta GSOMIA dengan Jepang.

Kesimpulan

Beberapa alasan di balik keputusan Korea Selatan yang tidak jadi menarik diri dari pakta GSOMIA, yaitu: semenanjung Korea yang secara teknis masih berperang hingga sekarang, dinamika ketegangan yang fluktuatif antara Korea Utara dan Korea Selatan, Korea Selatan dan Jepang sama-sama terancam nuklir Korea Utara, dan hubungan kuat antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Sesuai dengan konsep keamanan nasional yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa alasan utama Korea Selatan tetap melanjutkan pakta GSOMIA adalah karena kepentingan keamanan nasional Korea Selatan.

Selain itu, berdasarkan teori kebijakan luar negeri yang dijelaskan oleh James N. Rosenau, ia mengatakan bahwa terdapat lima variabel yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan luar negeri. Variabel pertama adalah variabel individu dari pembuat kebijakan, yang mana dalam penelitian ini adalah karakteristik dari Presiden Moon Jaein yang progresif, logis, dan rasional. Variabel kedua adalah peran, yang mana dalam penelitian ini, yang dilihat adalah bagaimana tindakan dari Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Korea Selatan dalam menjalankan perannya sebagai salah satu pembuat kebijakan luar negeri. Variabel ketiga adalah variabel sosial, yang mana dalam penelitian ini, pakta GSOMIA dapat setidaknya membantu mengatasi ketakutan dan ketegangan yang dirasakan masyarakat Korea Selatan dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara. Variabel keempat adalah sistemik, yang mana dalam penelitian ini adalah aliansi Korea Selatan dengan Amerika Serikat yang sudah terjalin sejak Perang Dingin membuat Amerika Serikat menjadi salah satu penentu arah kebijakan luar negeri Korea Selatan dalam menghadapi Korea Utara. Sedangkan variabel yang terakhir adalah pemerintah, yang mana dalam penelitian ini, lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di Korea Selatan saling mendukung untuk melanjutkan pakta GSOMIA dengan Jepang.

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi bagi penelitian kedepannya, terutama penelitian yang

berkaitan dengan kajian hubungan internasional yang terjadi di kawasan Semenanjung Korea. Penulis juga mengakui bahwa penelitian ini memiliki banyak kekurangan sehingga penulis ingin memberi saran pada mahasiswa atau pihak manapun yang menggunakan penelitian ini sebagai referensi untuk dijadikan pedoman dalam penelitian yang lebih lanjut agar menambah data-data yang lebih banyak dengan teknik pengambilan data triangulasi agar penelitian yang dilakukan akan menjadi lebih sempurna.

Referensi

- Basu, Titli. Ketegangan Perdagangan Jepang-Korea Selatan. airworldservice.org/indonesian/2019/08/29/keteganga-perdaganga-jepang-korea-selatan/. [Diakses pada 17 Desember 2020]
- Brazinsky, Gregg. US-South Korea Relations. <https://digitalarchive.wilsoncenter.org/resource/modern-korean-history-portal/us-south-korea-relations-1945>. [Diakses pada 15 Desember 2020]
- Buzan, Barry. (1991). "New Patterns of Global Security in The Twenty-First Century", *International Affairs Journal* Vol. 67 No. 3. <https://doi.org/10.2307/2621945>.
- Buzan, Barry. [1983]. *People, State and Fear: The National Security Problem in International Relations*. Brighton, Sussex: Department of International Studies University of Warwick.
- Chae, Haesook dan Kim, Steven. [2008]. *Conservatives and Progressives in South Korea*. Washington: The Washington Quarterly.
- Defense Minister: GSOMIA Should Be Kept If It Helps Security. http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=e&Seq_Code=149109. [Diakses pada 19 Desember 2020]
- Denmark, Abraham M. *The U.S.-ROK Alliance and Policy Coordination Toward China*. <https://www.cfr.org/blog/us-rok-alliance-and-policy-coordination-toward-china>. [Diakses pada 20 Desember 2020]
- GFP Power Ranking Index of Nations Since 2005. <https://www.globalfirepower.com/global-ranks-previous.asp>. [Diakses pada 16

Desember 2020]

Howe, Brendan M. Pesan e-mail kepada penulis. 9 Januari 2021.

Jung, Damin. Criticism Grows over US Pressing Seoul on GSOMIA. https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2020/08/205_278418.html. [Diakses pada 20 Desember 2020]

Kim, Tong Hyung. South Korean President Moon Calls for 4th Summit With Kim Jong Un. <https://thediplomat.com/2019/04/south-korean-president-moon-calls-for-4th-summit-with-kim-jong-un/>. [Diakses pada 2 Juni 2021]

Kim, You Geun. Korea Conditionally Suspends Termination of Military Pact with Japan.. <https://www.korea.net/NewsFocus/policies/view?articleId=179694>. [Diakses pada 25 Desember 2020]

Landler, Mark dan Sanger, David E. Trump and Kim Jong-un to Hold Second Summit Meeting Next Month. <https://www.nytimes.com/2019/01/18/us/politics/trump-kim-summit.html>. [Diakses pada 13 Desember 2020]

Larasati, Rina Ayu. Korsel Hapus Jepang dari Daftar Mitra Dagang Utama. <https://money.kompas.com/read/2019/08/12/210216326/korsel-hapus-jepang-dari-daftar-mitra-dagang-utama>. [Diakses pada 19 Desember 2020]

Lee, Young Chae. Wawancara oleh Korea.net. 31 Oktober 2019.

Lew, Young Ick. [2000]. Brief History of Korea. USA: The Korea Society.

Manyin, Mark E. [2020]. North Korea: A Chronology of Events from 2016 to 2020. USA: Library of Congress, 2020. https://www.everycrsreport.com/files/20200505_R46349_6307d94932ea867fd6c287e740681164c6f83bd3.pdf.

Milani, Marco. [2018] “Korean Peninsula 2016: The Never-Ending Crisis”. The Journal of the Italian Think Tank on Asia, No 91. <https://www.asiamaior.org/files/04%20Asia%20Maior%202016%20Korean%20Peninsula.pdf>.

Moon, Yoo Kang. S. Korea Succumbs to US Pressure to Extend GSOMIA. english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/918428.html. [Diakses pada 20

Desember 2020]

North Korea Missile Activity in 2017. <https://armscontrolcenter.org/fact-sheet-north-korea-missile-activity-2017/>. [Diakses pada 8 Desember 2020]

North Korea Nuclear Crisis: Putin Warns of Planetary Catastrophe. <https://www.theguardian.com/world/2017/sep/05/south-korea-minister-redeploying-us-nuclear-weapons-tensions-with-north>. [Diakses pada 8 Desember 2020]

President Moon Hosts Town Hall Meeting Televised Live". <https://english1.president.go.kr/Media/News/652>. [Diakses pada 25 Desember 2020]

Rich, Motoko dan Wong, Edward. Under U.S. Pressure, South Korea Stays in Intelligence Pact With Japan.. <https://www.nytimes.com/2019/11/22/world/asia/japan-south-korea-intelligence.html>. [Diakses pada 18 Desember 2020]

Rom, Yang Sae. From Re-implementation of the Controversial Korea-Japan Military Information Agreement to the Final Signing. <https://n.news.naver.com/article/421/0002409353>. [Diakses pada 19 Desember 2020]

Rosenau, James N. [2006]. *The Study of World Politics*. New York: Routledge.

Sheen, Seong Ho. South Korea's Overdue Defence Reforms. <https://www.eastasiaforum.org/2019/05/29/south-koreas-overdue-defence-reforms/>. [Diakses pada 16 Desember 2020]

South Korea Court May Rule on Japan firm Asset Sale in Aug. at Earliest. <https://english.kyodonews.net/news/2020/06/1eae94c9f36d-s-korea-court-may-rule-on-japan-firm-asset-sale-in-aug-at-earliest.html?phrase=ruby&words>. [Diakses pada 23 Desember 2020]

State of the Union: Trump Announces Second North Korea Summit. <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47139969>. [Diakses pada 13 Desember 2020]

Suko, Sri. [2012]. *Alchtisar Sedjarah Perang Korea*, (Jakarta: Departen Pertahanan-Keamanan: 1971), dalam Leo Agung, *Sejarah Asia Timur 2*. Yogyakarta: Penerbit Ombak: 2012.

Tan, Erwin. Pesan e-mail kepada penulis. 10 Februari 2021.

The End of GSOMIA: 55% Good Decision VS 38% Bad Decision.

[www.realmeter.net/한일-지소미아-종료-잘한-결정-55-vs-잘못한-결정-](http://www.realmeter.net/한일-지소미아-종료-잘한-결정-55-vs-잘못한-결정-38/?ckattempt=1)

[38/?ckattempt=1](http://www.realmeter.net/한일-지소미아-종료-잘한-결정-55-vs-잘못한-결정-38/?ckattempt=1). [Diakses pada 19 Desember 2020]

Yonhap. FM Sees Point in Claims GSOMIA Termination Could Benefit NK, China.

www.koreaherald.com/view.php?ud=20191108000616. [Diakses pada 19 Desember 2020]

Yonhap. US Expresses 'Strong Concern,' 'Disappointment' at Termination of Seoul-

Tokyo Intel Pact. www.koreaherald.com/view.php?ud=20190823000106. [Diakses pada 20 Desember 2020]

Yoshiyuki, Aoki. What Comes After S. Korea Reverses Decision to End GSOMIA?.

<https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/backstories/763/#:~:text=South%20Korea%20announced%20last%20week,known%20as%20GSOMIA%2C%20in%20place.>

[Diakses pada 15 September 2020]